

GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT PADARINCANG MELAWAN RENCANA EKSPLOITASI SUMBER DAYA AIR OLEH DANONE AQUA

Nina Yuliana : yuliananina@rocketmail.com

Idi Dimiyati : ididimiyati@gmail.com

Ismanto : singodimejo_gi@yahoo.com

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten–Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini menggunakan dasar awal dari hasil penelitian kritis, diantaranya Laclau, Mouffe, Foucault, Marxis, yang mendasarkan pada asumsi bahwa privatisasi, komersialisasi dan komodifikasi sumber daya air dengan melanggar kedaulatan hak asasi rakyat atas air oleh Pemerintah (khususnya Kabupaten Serang-Banten, Indonesia) dan masuknya Aqua – Danone sebagai company (diartikan dengan kompeni = penjajah oleh masyarakat Padarincang khususnya) seperti Foucault sebutkan, “berimbas pada ‘pembentukan kekuatan, menjadikan masyarakat baru yang bangkit, dan menata masyarakat untuk menyongsong demokrasi melawan praktek yang penuh kontrol, kekuasaan, dan keuntungan. Penghancuran terhadap segenap gagasan terhadap ideologi kapitalis melalui kekuatan pengetahuan dan beragama dengan teguh memegang prinsip ber-Qur’an. Melalui konsep kajian budaya (*cultural studies*), penelitian ini menunjukkan bagaimana suatu perusahaan, khususnya pabrik Aqua Danone (PT. Tirta Investama), yang menggunakan kekuatan modal dan kekuasaan dalam strategi ekspansi pasar. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Padarincang melalui teknik snowball sampling terhadap masyarakat Padarincang, baik yang pro, yaitu mereka yang menjual tenaganya yang tunduk pada (kekuasaan) modal, dan setiap orang yang terlibat dalam relasi-relasi sosial yang lain maupun pihak yang kontra Danone, termasuk para NGO dan mahasiswa yang terlibat dalam gerakan sosial masyarakat Padarincang.

Key words: privatisasi, komersialisasi, gerakan sosial

1. Latar Belakang

Atas nama investasi, perusahaan internasional seringkali hadir hingga ke pelosok-pelosok daerah di berbagai negara dunia ketiga untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Mereka berusaha menguasai sumber daya alam yang memiliki nilai

ekonomi untuk meningkatkan produksi komoditasnya. Bermodal kekuatan dana yang besar dan lobi yang kuat, perusahaan internasional mudah mendapatkan perijinan dari pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat. Dengan alasan investasi dan mendorong terbukanya lapangan kerja, pemerintah

antusias menyambut datangnya perusahaan-perusahaan asing tersebut. Pada proses ini, suara masyarakat lokal tempat sumber daya alam berada seringkali diabaikan. Masyarakat dipaksa pasif menerima kebijakan dan keputusan sepihak pemerintah dan pemilik modal. Padahal, masyarakat lokal yang akan terkena dampak langsung dari kehadiran perusahaan.

Tidak jarang. Praktek demikian pada akhirnya menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal yang menolak kehadiran perusahaan karena dinilai akan mengancam sumber kehidupan dan lingkungan tempat tinggal mereka, meskipun di sisi lain, ada pihak pro pemerintah dan pemilik modal dari masyarakat. Kondisi ini kemudian melahirkan konflik horizontal maupun vertikal dalam masyarakat.

Realitas di atas terjadi di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada Tahun 2007, Bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman menerbitkan Surat Izin Bupati nomor 593/Kep.50-Huk/2007 kepada PT. Tirta Investama yang merupakan group Aqua Danone di Indonesia untuk melakukan eksplorasi sumber daya air tanah di Kawasan Cirahab, Padarincang. Kawasan ini dikenal kaya

akan sumber mata air alami yang menjadi incaran berbagai korporasi yang bergerak di industri air, khususnya air minum dalam kemasan. Bahkan, saat ini pun ada beberapa perusahaan kecil yang mengambil air permukaan tanah di wilayah tersebut.

Legalitas Aqua Danone untuk mendirikan pabrik air minum ditolak masyarakat lokal Padarincang karena khawatir sumber mata air akan habis dan kering. Berbagai alasan dan analisa masyarakat kontra Danone diantaranya: Studi banding masyarakat Padarincang ke Sukabumi dan Klaten, dua lokasi lain perusahaan Aqua Danone yang merasakan dampak nyata dari eksploitasi sumber mata air oleh Aqua Danone, yaitu kekeringan diberbagai wilayah sekitar karena penyedotan yang dilakukan jauh melebihi batas amdal. Belum lagi keganjilan-keganjilan yang terjadi dalam proses pendirian pabrik Aqua di Padarincang. Dimulai dari SK bupati yang keluar sebelum analisis amdal selesai, sama sekali tidak ada upaya melibatkan masyarakat, alasan-alasannya, sampai cara-cara yang digunakan Aqua untuk mendapatkan lahan dan selama proses pendirian pabrik dilakukan.

Gerakan resistensi masyarakat Padarincang terbagi dalam dua jilid yang bersinambungan. Pertama tahun 2007-2008. Perlawanan dilakukan berdasarkan disparitas wilayah gerakan, yaitu forum masyarakat lintas Barat dan Timur. Bentuk perlawanan dilakukan lewat jalur birokrasi, meskipun aksi konfrontasi juga dilakukan. Audiensi dengan pemerintah eksekutif, dan legislatif dilakukan, tanpa hasil, kecuali janji-janji bohong yang kemudian dilanggar sendiri oleh pemerintah. Jilid kedua Masyarakat lokal Padarincang mengkonsolidasi diri dalam sebuah gerakan sosial yang mereka namakan Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone (GRAPPAD). Gerakan ini akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2008, PT Tirta Investama sempat menghentikan sementara pembangunan pabrik tersebut.

Penghentian sementara itu berlangsung sekitar dua tahun dari 2008 hingga 2009. Pada tahun 2010, pembangunan kembali dilanjutkan. Upaya melanjutkan kembali pembangunan pabrik air minum tersebut kembali menyulut perlawanan masyarakat Padarincang. Bahkan, gerakan sosial masyarakat pada tahun

2010 jauh lebih besar dan massif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Puncaknya, setelah perjuangan jalur birokratis dari tahun 2008 yang terus mengalami kebuntuan, pada 5 Desember 2010 lebih dari 6000 orang warga Kecamatan Padarincang dan masyarakat Banten peduli, melakukan aksi istighosah yang pertama, dilokasi pembangunan pabrik yang berakhir dengan demonstrasi. Mereka mendatangi lokasi pabrik dengan berjalan kaki. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, bahkan banyak diantaranya menggendong bayi bergerak ke lokasi pabrik untuk menolak dilanjutkannya pembangunan pabrik air minum Aqua Danone. Melihat tegak, luas, dan kokohnya pabrik, serta kesiapan operasional pabrik yang hampir seratus persen, diantaranya 3 mata bor alat penyedot air yang sangat besar-besar, membuat emosi warga tak terkendali. Alat produksi perusahaan pun menjadi sasaran. Alat bor, bangunan pabrik, dan mobil milik PT. Tirta Investama pun mereka hancurkan.

Polisi kemudian menangkap beberapa orang warga yang dianggap sebagai pimpinan aksi yang berlangsung anarkis tersebut. Akan tetapi, justru kemudian aksi penangkapan itu pun

dibalas oleh warga Padarincang dengan menculik Wakapolres Serang yang kebetulan sedang berada di Polsek Padarincang. Wakapolres dijadikan sandera oleh warga Padarincang untuk ditukar dengan warga yang ditahan polisi. Aksi saling sandera antara polisi dan warga Padarincang yang tergabung dalam gerakan perlawanan itu menarik perhatian banyak kalangan, mulai dari bupati, polisi, perusahaan, warga maupun media massa. Mediasi yang dilakukan di antara kelompok yang terlibat konflik akhirnya berujung pada pembebasan masing-masing sandera. Kesepakatan pun diambil soal kelanjutan pembangunan pabrik air minum tersebut.

Akhirnya, pada Februari 2011, melalui berbagai berita di media massa, pihak dari Danone Aqua mengumumkan pembatalan soal pendirian pabrik air minum di wilayah Cirahab, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia. PT. Tirta Investama menyatakan keluar dari wilayah Padarincang dan mencari wilayah lain. Pembatalan itu menjadi salah satu puncak dari keberhasilan gerakan sosial yang dilakukan masyarakat lokal di Indonesia. Sebab, kasus ini menjadi satu-satunya dalam

sejarah pendirian pabrik air minum Aqua Danone di Indonesia yang berhasil digagalkan oleh kekuatan gerakan sosial masyarakat lokal. Masyarakat lokal di Padarincang berhasil menghimpun kekuatan dalam sebuah gerakan sosial untuk melindungi haknya atas privatisasi sumber daya air yang didukung oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, gerakan sosial masyarakat Padarincang ini cukup menarik untuk dijadikan sebuah kajian penelitian. Kesadaran warga terhadap aspek kebutuhan atas air, pada taraf tertentu membangkitkan hak yang harus diperjuangkan jika terdapat upaya privatisasi atas air demi tuntutan dan ekspansi pasar. Menjadikan air sebagai komoditas, melakukan komodifikasi dan komersialisasi air. Kekuasaan dari pemilik modal dan pemerintah yang melanggar kedaulatan masyarakat Padarincang, seperti Foucault sebutkan, “berimbas pada pembentukan kekuatan, menjadikan mereka tumbuh dan menata mereka. Masyarakat terus berusaha untuk melipatgandakan power, bertahan dan melawan dengan jalan melipatgandakan resistensi dan kontra-ofensif dengan bersifat radikal dan tanpa kompromi untuk melawan totalitas kekuasaan.

Masyarakat Padarincang bangkit dan tumbuh menjadi masyarakat politik. Bagi Foucault, hal ini memungkinkan terjadi karena kekuasaan terdistribusi di semua relasi sosial dan tidak dapat direduksi menjadi bentuk-bentuk dan determinasi-determinasi ekonomis terpusat atau menjadi karakter legal atau yuridis. Bahkan, kekuasaan bukan hanya represif, tetapi juga produktif, ia melahirkan subjek (gerakan sosial). Foucault tidak atau 'merumuskan' kekuasaan sebagai kekuatan pengendali yang terpusat, namun, kekuasaan tersebar pada semua level formasi sosial, karena kekuasaan bersifat generatif, yang artinya, memproduksi relasi-relasi sosial dan identitas baru (Barker, 2008: 85).

Masyarakat Padarincang yang telah memahami tentang keharusan melindungi air dari segala bentuk privatisasi dan komersialisasi telah pula menyadari betapa negara dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemda Kabupaten Serang, bukan hanya telah mencederai hak dasar warga secara kontekstual, tetapi juga bertolak belakang dengan semangat menjalankan amanah secara tekstual tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an yang mereka yakini kebenarannya.

Kondisi ini menggerakkan kekuatan dan kekuasaan masyarakat untuk menghentikan upaya komersialisasi air. Mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk mencabut izin yang diberikan kepada PT. Tirta Investama, membendung proyek eksploitasi air atas nama investasi sebagai bentuk kesadaran keagamaan mereka, yakni jihad melawan ancaman kekeringan dan memaksa pihak Aqua Danone untuk keluar dari wilayah mereka.

Pemikiran Foucault dalam memaknai gerakan sosial sejalan dengan Teori Gerakan Kemasyarakatan Baru (pasca-Marxisme dan konstruksi diskursif 'kehidupan sosial') Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Konsep gerakan baru menurut Laclau dan Mouffe, merangkum berbagai gerakan atau perjuangan yang tidak berbasis kelas dan bukan gerakan buruh, seperti gerakan kaum urban, gerakan lingkungan, gerakan anti-otoriterisme, gerakan anti rasisme, dan gerakan etnis (Laclau & Mouffe 1999: 159-160). Gagasan ini berkaitan dengan gagasan demokrasi yang lebih radikal, tapi mengakui pluralitas gerakan (Chantal & Mouffe dalam Budianta, 2003: 149).

Asumsi-Asumsi dasar dari pemikiran Laclau dan Mouffe

dalam Teori Gerakan Kemasyarakatan Baru diantaranya adalah; Kapitalis mutakhir telah merasuk ke segala lingkaran kehidupan, sehingga melahirkan banyak antagonisme baru seperti antagonisme antara mereka yang habitatnya tercemar dengan korporasi penyebabnya, dan lain-lain. Konsekuensinya adalah bahwa kapitalisme dalam bentuknya yang semakin canggih harus dilawan di berbagai front. Namun berbagai bentuk perjuangan demokratik itu hanya dapat dianggap demokratik, apabila tidak hanya saling menghormati, tapi juga saling kerjasama, tanpa harus didominasi oleh satu gerakan, dalam mempertanyakan segala bentuk ketidaksetaraan dan subordinasi (Chantal & Mouffe dalam Budianta, 2003: 149).

Masyarakat konsumen sebagai akibat kapitalis dan komodifikasi, kata Laclau dan Mouffe, tidak menyebabkan berakhirnya ideologi, seperti kata Daniel Bell, atau menciptakan manusia 'satu dimensi', seperti yang dikhawatirkan Herbert Marcuse, tapi sebaliknya, melahirkan berbagai bentuk perjuangan baru yang menunjukkan perlawanan terhadap bentuk-bentuk subordinasi baru, yang muncul dari

jantung masyarakat baru ini. Aksi-aksi yang menentang pemborosan sumber-sumber daya alam, pencemaran dan perusakan lingkungan, akibat ideologi produksi demi produksi ini, melahirkan gerakan lingkungan. Begitu pula aksi-aksi menentang hancurnya kawasan kota karena urbanisasi besar-besaran melahirkan gerakan untuk menuntut kehidupan kota yang lebih baik. Dari sinilah timbul gerakan-gerakan sosial yang menentang ketidakadilan dan menuntut hak-hak baru (Laclau & Mouffe, 1999: 161)

Teori postkolonial terkait dengan konsep utamanya yaitu persoalan relasi yang berbentuk "dominasi-subordinasi". Relasi ini terjadi mulai dari level makro sampai mikro, mulai dari antar negara sampai dengan antar level masyarakat dan bahkan sampai dengan antar jenis kelamin. Teori postkolonial menunjukkan bahwa "dunia ketiga" tidaklah seragam. Ada heterogenitas baik karena wilayah, manusia dan kultur. Juga menunjukkan ada resistensi tertentu dari Timur ke Barat (Leela, 2006).

Teori postkolonialisme memperjuangkan narasi-narasi kecil, membangkitkan kesadaran bahwa

penjajah bukan semata-mata dalam bentuk fisik melainkan juga secara psikologis yang tidak hanya berdampak dalam segi ekonomi tapi juga dalam hal budaya. Hegemoni penjajah yang luar biasa dan persinggungan *pluralisme* budaya yang telah banyak menyuguhkan persoalan etnis, khususnya di daerah rawan konflik, menjadi kajiannya.

Teori postkolonial mewujudkan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya identitas kebangsaan, pentingnya nilai-nilai kemerdekaan dan juga humanisme. Jadi, teori ini lahir untuk membongkar relasi kuasa yang membungkus struktur yang didominasi oleh hegemoni kolonial. Inti kritik dari postkolonial terhadap kolonialisme sesungguhnya bukan dalam bentuk penjajahan secara fisik yang telah melahirkan berbagai kesengsaraan dan penghinaan hakekat kemanusiaan, melainkan pada bangunan wacana dan pengetahuan termasuk bahasa (Ratna, 2008), dengan penaklukan pikiran, jiwa dan budaya; dan dikotomi (Barat-Timur, superioritas-inferioritas, dll) yang merupakan simplifikasi yang menyesatkan (Moore & Gilbert, 2000).

2. Privatisasi dan Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia

Dalam proses pembahasan RUU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air, isu tentang privatisasi dan komersialisasi air sehingga bagi yang tidak mampu akan sulit mendapatkan air untuk kebutuhan pokok muncul dan menjadi perdebatan yang cukup alot. Munculnya isu tersebut karena muncul pasal-pasal tentang pengusahaan sumber daya air. Diantaranya, penjelasan umum pasal 10; pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan melalui berbagai jenis/bentuk usaha, antara lain pemanfaatan air alam sebagai bahan baku utama suatu produk, misalnya produk PDAM dan perusahaan air mineral. Undang-undang No.11 tahun 1974 tentang Pengairan hanya menyebutkan bahwa pengusahaan air dan atau sumber-sumber air dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bilamana ada badan hukum, badan sosial atau perorangan yang akan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari pemerintah, dengan berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Realisasi dari apa yang disebut Marx sebagai “demokrasi sebenarnya”, yang

menurut analisisnya, membawa serta penanggungan keterasingan antara individu dengan masyarakat politik, dengan cara meleburkan dikotomi antara kepentingan-kepentingan “egoistis” dari individu-individu di dalam masyarakat sipil dengan sifat “sosial” dari kehidupan politik (Giddens, diterjemahkan oleh Kramadibrata, 2007:7).

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan, sampai saat ini air telah telah dijual dalam bentuk kemasan dengan berbagai merek. Harga yang dipatok pun bervariasi. Misalnya untuk satu botol dengan volume netto 600 ml atau 0,6 liter mulai dari Rp 2000 – Rp 6000.- bahkan ditempat tertentu (hotel berbintang lima) harganya sampai Rp. 20.000. Sedangkan harga jual air baku yang dibayarkan oleh PDAM untuk 1000 liter hanya berkisar antara Rp 35 hingga Rp 60. Oleh karena itu banyak pihak mengkhawatirkan UU ini bisa mengarahkan pada bentuk privatisasi dan monopoli sehingga rakyat kecil yang berhak atas air sebagai salah satu sumber kehidupan justru akan termarginalkan atau harus membayar dengan biaya yang lebih tinggi (Kodotie & Basoeki, 2005: 104-106).

3. Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone (GRAPPAD)

Gerakan sosial masyarakat Padarincang memiliki dua babak, yang disebut gerakan sosial masyarakat Padarincang Jilid I dan gerakan sosial masyarakat Padarincang Jilid II. Gerakan sosial masyarakat Padarincang Jilid I merupakan gerakan sosial masyarakat Padarincang yang dimulai pada tahun 2008. Gerakan masyarakat ini meski ada koordinasi tapi terpisah berdasarkan wilayah, yakni Forum Lintas Barat dan Forum Lintas Timur.

Gerakan sosial jilid II. Gerakan sosial masyarakat Padarincang ini terjadi pada tahun 2010 dengan nama GRAPPAD. GRAPPAD adalah kepanjangan dari Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone. Mereka yang tergabung di dalamnya adalah koalisi rakyat, gerakan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Padarincang. Mereka berhimpun dengan satu keyakinan bahwa segala bentuk eksploitasi hanya akan menimbulkan dampak negative bagi masyarakat dan lingkungan. Pun hanya akan menguntungkan segelintir orang, utamanya kaum penguasa dan pengusaha.

Koalisi ini menurut Marx merupakan perwujudan sebagai warga merdeka yang merupakan ekspresi nyata sebagai *zoon politicon*. Ranah politik dan sosial tergabung menjadi satu, tanpa bisa dipisah-pisahkan dan tidak ada lingkungan yang melulu bersifat ‘politik’. Kehidupan pribadi dan kehidupan umum tidak dapat dibedakan. Dalam kerja pergerakannya melawan privatisasi, komersialisasi dan mempertahankan haknya atas air, GRAPPAD melakukan aliansi dengan banyak NGO nasional seperti Kontras, LBH Jakarta, Walhi, KRUHA serta badan-badan lain yang memiliki jaringan nasional di Indonesia. Bahkan, mereka melakukan lobi, konsultasi dan permintaan dukungan dari asisten kepresidenan Mizwar Anas, hingga presiden.

GRAPPAD merupakan gerakan masyarakat yang berusaha melawan: 1). Orang, Badan, Lembaga, Perusahaan yang menyatakan dan memeperaktekan bahwa air adalah komoditas komersial, yang dengan seenaknya diperdagangkan demi keuntungan semata, 2). Mereka yang dengan seenaknya memasang meteran di jaringan irigasi persawahan, rumah-rumah penduduk, kolam-kolam ikan, sekolah dan rumah sakit serta

sarana publik lainnya, dan 3). Semua kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga yang akan mendorong terjadi kesengsaraan masyarakat akibat dari bencana yang ditimbulkannya

Tujuan yang lebih khusus dari gerakan ini, adalah: 1). Mendesak pemerintah Kabupaten Serang untuk mencabut surat izin dengan nomor 593/Kep.50-Huk/2007 tentang izin lokasi pembangunan Pabrik Danone oleh PT. Tirta Investama di kawasan Cirahab Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, serta tidak menerbitkan SK baru atau legalitas lainnya terkait PT. Danone Aqua, 2). Mempertahankan kawasan Padarincang khususnya Cirahab dan sekitarnya sebagai area pertanian dan sebagai wilayah konservasi air, 3). Melindungi kawasan cagar alam Rawa Danau dari bahaya kekeringan, 4). Mencegah terjadinya proses komersialisasi dan atau privatisasi air yang hanya akan menghilangkan hak dasar warga atas air

4. PT Tirta Investama / Aqua Danone

Aqua merupakan pelopor bisnis air minum dalam kemasan (AMDK)

sekaligus produsen terbesar di Indonesia. Bahkan pangsa pasarnya sendiri sudah meliputi Singapura, Malaysia, Fiji, Australia, Timur Tengah dan Afrika. Di Indonesia Aqua menguasai 80 persen penjualan AMDK berbentuk galon. Sedangkan untuk keseluruhan bisnis AMDK di Indonesia, Aqua menguasai 50% pangsa pasar. Saat ini Aqua memiliki 14 pabrik yang tersebar di Jawa, Sumatra, Bali dan Sulawesi.

Produsen AMDK merk Aqua yakni PT. Golden Mississippi yang kemudian bernama PT Aqua Golden Mississippi didirikan oleh Tirta Utomo (1930-1994) pada 23 Pebruari 1974. Pabrik pertamanya didirikan di Bekasi. Pada 4 September 1998, AQUA (yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama) melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan Group DANONE, sebuah korporasi multinasional asal Perancis yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia. Di bawah bendera DANONE-AQUA, kini AQUA memiliki lebih dari 1.000.000 titik distribusi yang dapat diakses oleh penggunaanya di seluruh Indonesia. Untuk produk AMDK, Danone

mengklaim telah menempati peringkat pertama dunia lewat merek Evian, Volvic, dan Badoit.

Tahun 2000 Aqua meluncurkan produk berlabel Aqua-Danone. Pada tahun 2001, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT. Tirta Investama dari semula 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Aqua-Danone.

Kehadiran pusat produksi Aqua Danone di beberapa wilayah Indonesia menghadirkan kisah yang merugikan masyarakat. Salah satu contoh adalah pada eksploitasi air di Kubang Jaya, Babakan Pari, Kabupaten Sukabumi. Mata air di Kubang telah dieksploitasi habis-habisan oleh Aqua sejak tahun 1992. Sebelumnya kawasan ini adalah lahan pertanian, yang kemudian di ubah menjadi kawasan ‘seperti hutan’ yang tidak boleh digarap. Sekeliling kawasan mata air Kubang dipagari tembok oleh Aqua-Danone dan dijaga ketat oleh petugas. Tak ada seorang pun yang boleh memasuki kawasan tersebut tanpa surat ijin langsung dari pimpinan kantor pusat Aqua Grup di Jakarta.

Pada awalnya air yang dieksploitasi adalah air permukaan. Namun sejak 1994, eksploitasi jalur air

bawah tanah dilakukan menggunakan mesin bor bertekanan tinggi. Sejak saat itu kualitas dan kuantitas sumberdaya air di wilayah tersebut menurun drastis. Masyarakat harus membayar mahal karena dampak berkurangnya ketersediaan air bersih. Tinggi muka air sumur milik kebanyakan warga maksimal hanya tinggal sejengkal (~15 cm). Bahkan beberapa sumur menjadi kering. Padahal sebelumnya, tinggi muka air sumur mencapai 1-2 meter. Ketika sumber air belum dieksploitasi, masyarakat hanya menggali sumur sedalam 8-10 meter untuk kebutuhan air bersih. Sekarang, warga perlu menggali hingga lebih dari 15-17 meter, atau membeli mesin pompa untuk mendapatkan air.

Masalah lain di Kubang Jaya adalah, kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi pertanian. Masalah ini dialami petani dari hampir semua kampung di kawasan desa Babakan Pari. Para petani di beberapa kampung tersebut saling berebut air karena ketersediaan air yang sangat kurang. Bahkan beberapa sawah tidak mendapat bagian air dan hanya mengandalkan air hujan. Akibatnya, banyak sawah kekeringan pada musim kemarau hingga penghasilan para petani terus merosot.

5. Menggugat Pemerintah

Privatisasi air telah menyebabkan hilangnya jaminan pelayanan hak dasar rakyat atas air, melanggar HAM, membuat akses masyarakat terhadap air terbatas dan mahal, merusak lingkungan, menimbulkan krisis air, mengganggu kebutuhan pertanian dan kehidupan dasar rakyat. Privatisasi PDAM dan bisnis AMDK oleh MNC telah mendatangkan berbagai dampak negatif yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan tindakan korektif. Peran pengelolaan air tidak dapat diserahkan pada swasta yang meletakkan keuntungan sebagai tujuan pertama (profit first).

Sindikatis internasional, termasuk BD, ADB, IMF dan WTO akan terus menjalankan agenda privatisasi dengan mendukung penuh MNC. Kerjasama sindikasi ini telah dan akan terus memaksa pemerintah untuk patuh menyerahkan kuasa dan manfaat atas sumberdaya air dan kekayaan alam lain milik negara. Untuk maksud tersebut, mereka telah memaksakan pemberlakuan UU No.7 Tahun 2004, dan hal ini tak lepas dari ketakutan pemerintah pada kekuatan asing, perilaku KKN pemegang kekuasaan,

dan nafsu menjajah yang diusung para kolonialis dan MNC, termasuk Aqua-Danone.

Pemerintah harus merubah sikap secara mendasar dalam pengelolaan sumberdaya air. Jaminan terhadap hak atas air bagi masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah. Pemerintah harus kembali pada amanat konstitusi, bahwa pengelolaan sumberdaya air harus dijalankan untuk memperoleh manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Privatisasi yang berlaku saat ini harus dikoreksi atau bahkan diakhiri. Seluruh penyelewengan dan pelanggaran yang telah terjadi, termasuk oleh MNC seperti Aqua-Danone harus diselesaikan secara tuntas dan diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Penegakan hukum atas Aqua-Danone merupakan salah satu gugatan dan tuntutan kami kepada pemerintah dalam tulisan ini. Itu kalau kita masih menganggap negara ini negara hukum dan kita masih mempunyai harga diri dan kedaulatan (Jurnal Kruha: Kasus Air Minum Dalam Kemasan).

6. Hasil dan Pembahasan

a. Kronologi Gerakan Sosial Masyarakat Padarincang

Perjuangan menolak pendirian Pabrik Danone oleh masyarakat Padarincang dimulai sejak tahun 2008, sebelum nama GRAPPAD dibentuk. Gerakan sejak tahun 2008 disebut masyarakat dengan gerakan sosial jilid I. Perbedaan antara kedua gerakan ini adalah bahwa gerakan jilid pertama meskipun telah berhasil menghentikan sementara Aqua Danone selama dua tahun, tetapi secara internal gerakan sebenarnya rapuh. Potensi perpecahan dan persaingan muncul dalam tubuh gerakan lantaran dalam struktur terbagi menjadi gerakan berdasarkan kelompok dan wilayah. Pada gerakan jilid I ini terdapat dua tokoh pemuda yang menjadi ketua gerakan. Mereka adalah Abdul Azis, yang menjadi ketua di forum lintas barat, sementara di wilayah timur diketuai oleh Abdul Basit. Sayangnya, nama Abdul Basit ini pada akhirnya dikenal sebagai pengkhianat oleh masyarakat Padarincang karena kemudian ia berbalik mendukung pemilik modal dan pemerintah demi mendapatkan keuntungan pribadi dari gerakan sosial yang ia pimpin.

Struktur gerakan yang terbagi berdasarkan wilayah ini disadari oleh para tokoh pemuda dari gerakan sosial masyarakat Padarincang merupakan kelemahan dan kesalahan besar. Menyebabkan kekuatan masyarakat Padarincang tidak padu. Kerugian lain adalah para tokoh dalam gerakan mudah dikenali sehingga secara hukum bisa ditangkap aparat karena dianggap provokator. Penangkapan tokoh penggerak gerakan bisa menghentikan atau setidaknya menghambat gerakan sosial yang mereka galang.

Gerakan sosial jilid I ini juga mencatat lahirnya Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPEL). Aliansi yang terdiri dari organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, LSM, serta himpunan para alim ulama, tokoh masyarakat dan aktivis yang didukung oleh berbagai lembaga seperti KontraS, LBH Jakarta, Walhi serta mendapatkan perhatian dari Komnas HAM. Pernyataan sikap kecaman yang ditandai warga dengan penyegelan pagar menuju lokasi pembangunan dilakukan, setelah berbagai jalur birokrasi seperti audiensi baik dengan bupati ,aupun DPRD dilakukan. Pada tanggal 12 Juni 2008 akhirnya bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman

bersedia menghentikan sementara pembangunan pabrik dan berjanji akan mencabut surat izin nomor 593/Kep.50-Huk/2007 tertanggal 8 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Bupati Serang dinilai banyak kelemahan dan kejanggalan. Misalnya tidak dilibatkannya masyarakat dan NGO dalam proses dengar pendapat dan ijin operasi yang sebenarnya belum ada karena AMDAL masih dalam proses penyelesaian. Padahal, AMDAL merupakan prasyarat yang harus dimiliki sebelum perusahaan melakukan aktifitas pembangunan pabrik.

Vice president Corporate Secretary PT. Tirta Investama Parmaningsih Hadinegoro melalui rilis yang disampaikan Hery Pradonggo kepada sejumlah wartawan menyatakan PT. Tirta Investama menghentikan pembangunan pabrik Aqua di Desa Curuggoong Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang hingga iklim investasi mendukung (Radar Banten, 23 September 2008). Dalam salah satu poin dari 9 poin isi rilis yang ditandatangani President Direktur PT. Tirta Investama Bernard Alain Marie Ducross itu disebutkan, dengan sangat menyesal PT. Tirta Investama terpaksa memutuskan untuk menunda proyek itu

dalam waktu yang tidak ditentukan. Heri menilai iklim investasi di Serang tidak kondusif dan terdapat birokrasi yang berbelit-belit (Banten Raya Post, 23 September 2008).

Pengumuman dari PT Tirta Investama itu kemudian melahirkan polemik di kalangan pejabat dan birokrat. Warga yang melakukan penolakan dituduh sebagai masyarakat tertutup dan irasional, tidak memiliki visi pembangunan dan cenderung anti kompromi, terbelakang dan sulit diajak maju. Misalnya pernyataan anggota DPRD Kabupaten Serang Komisi B Abdul Muhyi yang menyayangkan kejadian diberhentikannya pembangunan pabrik Danone, karena sangat susah mendatangkan investor untuk masuk ke daerah. Akan tetapi, ketika ada yang bersedia, kenapa justru harus ditolak? (Radar Banten, 2 September 2008).

Ketua Forum Lintas Barat Abdul Azis mengatakan warga yang melakukan penolakan pabrik Danone jangan diartikan anti investasi, masyarakat sesungguhnya terbuka terhadap investasi tetapi bukan komersialisasi air melalui eksploitasi yang hanya merusak lingkungan. Ia menegaskan wilayah Padarincang

merupakan area persawahan yang sepenuhnya mengandalkan air. Jika sumber air kemudian kering, maka yang menjadi korban adalah para petani yang merupakan kelompok mayoritas di wilayah tersebut. Apalagi, sebenarnya dalam Perda No.2 Tahun 2009 soal tata ruang di Kabupaten Serang, wilayah Serang bagian selatan, termasuk Padarincang di dalamnya, menjadi sektor yang berbasis agrobisnis dan konservasi alam.

b. Gerakan Sosial Masyarakat Padarincang Jilid II

Pertengahan tahun 2010 warga Padarincang kembali bergejolak setelah mendapatkan kabar bahwa Bupati akan meneruskan rencana pembangunan pabrik Danone di Cirahab. Reaksi kembali muncul dan mempertanyakan komitmen bupati atas pernyataan awal yang siap mencabut surat izin pembangunan yang telah diberikan kepada PT. Tirta Investama. Alasan bupati, dalam pertemuan dengan 12 kepala desa se-kecamatan Padarincang yang digelar di Laguna, Cilegon semuanya sepakat pembangunan pabrik Aqua Danone dilanjutkan. Untuk itu, bupati menyatakan Aqua Danone kembali diijinkan untuk meneruskan pembangunan pabrik.

Bercermin dari pengalaman gerakan sosial yang dilakukan selama dua tahun sebelumnya, termasuk pengkhianatan Abdul Basit sebagai Ketua Forum Lintas Timur yang kemudian berbalik mendukung pembanguna pabrik Aqua Danone, masyarakat berusaha membangun gerakan perlawanan dengan strategi yang berbeda. Mereka membangun gerakan dalam satu wadah. Semua melebur, berkoalisi, menjadi Gerakan Masyarakat Padarincang Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone atau GRAPPAD.

Pada pertengahan Juni 2010 GRAPPAD menggelar forum terbuka yang melahirkan kesepakatan mengenai bahaya krisis yang paling penting di Padarincang. Forum ini digelar sebagai bentuk respon dari akan dilanjutkannya rencana pembangunan pabrik Danone yang pada tahun 2008 sempat dihentikan karena ada penolakan dari warga. Forum yang dihadiri beberapa aktivis, tokoh pemuda, ulama dan perwakilan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan ini merumuskan sikap yang perlu ditempuh atas komersialisasi dan privatisasi air di Padarincang. Forum itu kembali memantik sikap penolakan terhadap

kebijakan pemerintah kabupaten Serang yang telah mengizinkan PT. Tirta Investama untuk beroperasi di Padarincang.

Spanduk, baligo dan media lain digunakan untuk menunjukkan sikap penolakan sebagaimana sebelumnya pernah dilakukan kembali menghiasi berbagai sudut wilayah Padarincang. Musyawarah akbar digelar untuk membangun kembali sikap bersama soal konsistensi penolakan warga atas pembangunan pabrik Aqua Danone. Pola gerakan yang sebelumnya memiliki struktur yang jelas berubah menjadi tanpa bentuk. Semua tokoh bergabung, tanpa dimunculkan koordinator gerakan secara jelas. Pola ini membuat setiap aksi perlawanan tampak sporadis tanpa ada komando dan perintah, tidak tertata secara struktural. Sampai ada yang menilai gerakan sosial jilid II terkesan sporadis dan tidak memiliki akar dukungan yang jelas.

c. Ragam Konflik dalam Peristiwa Gerakan Sosial Anti Pembangunan Pabrik Aqua Danone

Selama berlangsungnya gerakan sosial menolak pembangunan pabrik

Aqua Danone terdapat dua kelompok yang berdiri dalam posisi berlawanan. *Pertama*, kelompok yang mendukung pembangunan, dan *kedua* kelompok yang menentang. Kedua kelompok ini terlibat konflik cukup tajam, baik secara vertikal maupun horizontal.

Kelompok Pro Aqua Danone

Bagian terbesar dari kelompok ini terdiri dari pengusaha, anggota dewan, jajaran pemerintah dari tingkat Gubernur sampai Kepala Desa, aparat kepolisian dan kaum jawara. Alasan yang sering mereka jadikan landasan mendukung pembangunan pabrik Aqua Danone antara lain; pembangunan pabrik itu dapat membuka lapangan pekerjaan, berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan akan berkontribusi bagi pengembangan pembangunan khususnya di kecamatan Padarincang.

Kelompok ini memiliki pandangan pragmatis. Sikap mereka cenderung pada bagaimana mendapatkan keuntungan finansial. Soal ancaman kekeringan dan hilangnya hak warga atas sumber daya air tidak banyak dipersoalkan. Secara politik kelompok ini memiliki cukup kuat karena mendapatkan dukungan dari DPRD Kabupaten Serang. Bahkan,

Damimi salah satu anggota DPRD yang berasal dari Komisi IV terlibat langsung dalam penggalangan dukungan di lapangan. Ia pun mengaku mendapatkan restu dari ‘alim ‘ulama yang terhimpun dalam kelompok pengajian Tambihul Umah. Penggerak pengajian ini memang memiliki relasi yang dekat dengan kekuasaan dan sebelumnya terlibat dalam gerakan penolakan sebelum berubah mendukung.

Hariri, pengusaha lokal yang tentu saja memiliki kepentingan langsung atas berdirinya pabrik air minum di wilayahnya, menjadi orang yang paling kuat dalam mendukung keberadaan pabrik Aqua Danone. Ia yang dianggap lawan utama bagi kelompok yang menentang pembangunan pabrik merupakan adik kandung dari Damimi.

Hariri dikenal sebagai pengusaha lokal yang banyak memiliki bisnis di Banten, seperti water boom, villa, dan lainnya, yang sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan tinggi di Banten (keluarga Atut). Bahkan, jaringan bisnisnya hingga ke luar daerah. Termasuk pernah merambah bisnis prostitusi di Kali Jodoh, Jakarta sebelum tempat itu dibubarkan oleh front pembela islam (FPI), sebuah

ormas keagamaan yang dikenal radikal. Bermodal uang, jaringan keluarga dan relasi kuat dengan kekuasaan Hariri aktif menggalang dukungan pembangunan pabrik Aqua Danone. Selain kakaknya yang anggota dewan, adik kandungnya yang bernama Iming Muhaimin juga adalah kepala Desa Citasuk, salah satu desa di Kecamatan Padarincang.

Hariri adalah ketua persatuan pengusaha proyek di Banten, oleh karenanya Hariri sangat dekat dengan keluarga besar Atut Chosiyah, dalam tingkatannya mulai wakil bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang merupakan adik kandung Atut, walikota Serang adik kandung Atut dan Masduki adalah kerabat Atut, ketua DPRD Serang yang juga intens diproyek, maupun kerabat Atut lainnya. Seperti dikatakan oleh ibu Iroh, istri Lurah Cikalumpang, desa kelahiran Hariri yang juga merupakan adik kandung Hariri, bahwa untuk persoalan apapun, terutama yang menyangkut disini (Padarincang), Hariri adalah orang yang sangat dipercaya oleh Atut selaku gubernur, Taufik selaku bupati atau Zaman sebagai walikota. Misalnya kalau ada pemilihan, termasuk untuk masalah Danone.

Keterkaitan dan keterikatan Hariri dengan keluarga Atut adalah kepentingan bisnis dalam lingkaran proyek. Seperti yang pernah peneliti (Nina Yuliana) dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bahwa proyek di Banten semua di atur dan dikuasai oleh klan Gubernur. Sehingga yang mendapatkan proyek adalah orang-orang yang dekat dengan klan tersebut, baik karena kerabat keluarga atau transaksi kepentingan lainnya. Ini kemudian yang menjadikan proyek pembangunan di Banten hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, dengan sistem monopoli. Yang membuat pembangunan di Banten, seperti yang dinyatakan oleh Fathul Sembiring di media memiliki prosentase nol. Tetapi tinggi dalam meredam gejolak. Kemudian penulis temukan justru Atut lah yang menguasai para Jawara Banten, melalui persatuan para pendekar Banten, dan keamanan di tingkat pemerintahan dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Para kepala Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok ini (Hariri dan Masduki), sebelumnya mereka pun termasuk dari kelompok yang melakukan penolakan,

seiring perjalanan waktu dan bahkan ada dugaan bahwa penolakan yang berubah menjadi dukungan ini lebih sebagai upaya untuk meningkatkan posisi tawar dihadapan PT. Tirta Investama. Ketika pada tanggal 22 Agustus 2008 12 kepala desa berkumpul di rumah makan Laguna - Cilegon dalam rangka membicarakan masa depan rencana pembangunan pabrik Aqua, hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan seluruh kepala desa se-Kecamatan Padarincang untuk mendukung PT. Tirta Investama melanjutkan pembangunan Pabrik Aqua Danone. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Serang Taufik Nuriman, ketua DPRD Kabupaten Serang Hasan Maksudi dan kepala DPLH Anang Mulyana. Atas sikap para kepala desa yang mendukung pihak Danone, Parmaningsih selaku Secretary Cooperation PT. Tirta Investama menyatakan masih menunggu keputusan Bupati Serang (dok. GRAPPAD).

Terkait pertemuan tersebut Abdul Azis menyatakan akan tetap mendatangi pihak DPRD Kabupaten Serang untuk menegaskan sikap penolakan meski telah ada bentuk dukungan dari 12 kepala desa se-Kecamatan Padarincang. Pertemuan di

Laguna dinilainya hanyalah konspirasi dan ia tidak merasa kaget atas hasil pertemuan tersebut karena sikap para kepala desa dari awal sudah bisa ditebak dan diprediksikan selama ini bahwa penolakan kepala desa di awal hanya untuk meningkatkan posisi tawar di hadapan perusahaan terbukti benar.

Adalah Hariri dan Masduki yang sangat berperan dalam berkumpulnya 12 kepala desa se-Kecamatan Padarincang tersebut di hotel Laguna. Dikatakan oleh Ustadzah Eha, bahwa banyak kepala desa yang pemilihannya di danai oleh Hariri. Menurut beberapa informan, ini bukan saja melibatkan uang Hariri, tetapi uang dan kepentingan Gubernur dan Bupati. Kekuatan dan kekuasaan inilah yang menjadikan Hariri lawan yang berat dalam gerakan masyarakat Padarincang. Bahkan saat adik iparnya mencalonkan menjadi kepala desa yang kedua kalinya, lawannya adalah bumbung bambu, alias calon tunggal. Begitu juga saat dikonfirmasi pada salah satu warga Cikalumpang, mengukuhkan bahwa tidak ada yang berani melawan Hariri, karena kekayaan yang dimilikinya sangat melimpah. Dengan uang, orang bisa berbuat sesukanya, apapun. Bahkan di kasus Danone ini, para jawara

menjadi andalan Hariri untuk menjaga keamanan disekitar lokasi proyek pembangunan. Menurut Yani, setiap harinya sekitar 15 sampai 20 orang jawara hilir mudik di depan pintu gerbang proyek, memastikan keamanan terjaga. Setiap hari para jawara ini dibayar dengan upah minimal 40 ribu rupiah sampai 100 ribu rupiah. Bahkan menurut Ibu Bedah, Hariri sangat dekat dan mampu menyewa para provost dan intel. Semua tunduk kepada Hariri. Hj. Heti dan Ibu Bedah menambahkan, pada saat amuk massa 10 Desember, Hariri telah menyiapkan keamanan maksimum bagi dirinya, yaitu pengawalan oleh sejumlah provost dan tentara.

Menurut para responden, yang diantaranya diwakili pernyataan Hj. Heti, janji politik dari pembiayaan kepala desa adalah jika dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif, para kepala desa tersebut menjadi penggalang massa. Kepala desa yang biaya pemilihannya di danai oleh Gubernur, maka dipastikan kontraknya adalah setiap pemilihan, di desa tersebut, partai yang diusung Gubernur dan keluarga besarnya harus menang. Jika tidak, maka jabatan kepala desanya dicopot. Digantikan dengan orang lain yang

dianggap mampu oleh pihak Gubernur atau Bupati, karena wakil Bupati serang sekarang, seperti diketahui adalah adik kandung Gubernur Atut, Ratu Tatu Chasanah. Bagi masyarakat Kecamatan Padarincang, menurut Yani, hal ini sudah menjadi rahasia umum. Seperti Lurah Barugbug Ciomas yang sudah dua periode menang, selalu dua kali di biyai Atut. Begitu juga peran Hasan Masduki, selain beliau juga mantan lurah, beliau juga berperan sama seperti Hariri, membantu membiayai pemilihan kepala desa. Dan saat menjadi ketua dewan, mempermudah anggaran yang diperuntukkan untuk desa.

Keterbukaan investasi menjadi alasan lain yang menguatkan upaya dukungan terhadap rencana eksploitasi air ini, jika Danone gagal beroperasi di Padarincang asumsinya adalah tidak akan ada investor lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasinya karena terdapat iklim investasi yang tidak kondusif di kabupaten serang khususnya di kecamatan Padarincang dan sekitarnya, yang menurut hemat para masyarakat yang kontra, alasan tersebut sangat irasional, dan terlalu mengada-ada, dan biasanya digunakan oleh orang-orang yang berfikir pragmatis dan praktis,

serta merupakan pola pikir picik dan putus asa, dan merupakan suatu propaganda pembodohan bagi masyarakat luas, seakan-akan tanpa Danone masyarakat tidak bisa maju. Padahal masih banyak jalan untuk meningkatkan regulasi perekonomian masyarakat, tanpa merusak alam dan melakukan eksploitasi, tanpa merampas hajat hidup orang banyak, tanpa memperkosa hak-hak manusia atas air, dan tidak melanggar batasan yang diberikan oleh Allah sang khalik, dan menjadikan kita tetap sebagai manusia yang pandai bersyukur, serta tidak termasuk golongan manusia yang kufur terhadap segala nikmat yang telah diberikan-Nya.

Kedua, kelompok kontra masyarakat yang menolak memiliki alasan jangka panjang dengan berbagai pertimbangan, bahwa tidak setiap kebijakan pemerintah harus selalu didukung mengingat kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang sangat besar, serta tidak berpihak terhadap kepentingan warga, kelompok ini cenderung beranggapan bahwa kebijakan pemerintah perlu dikawal dan dikontrol untuk menghindari dampak buruk akibat dari kegagalan kebijakan,

beberapa alasan dan tujuan penolakan ini antara lain:

1. Mempertahankan hak dasar warga atas air
2. Melindungi sumber air dari ancaman kekeringan
3. Menjaga ketentraman dan kenyamanan Padarincang sebagai daerah pertanian
4. Menghindari terjadinya kerusakan yang lain sebagai efek domino dari aktifitas industry yang bersifat eksploitatif
5. Menjaga ketersediaan air Rawa Danau sebagai cagar alam yang harus dipertahankan
6. Menjaga keberlangsungan mata pencaharian serta produktivitas masyarakat sebagai petani

Pandangan kelompok yang kontra lebih berdasar pada bagaimana menjaga kelestarian alam sekitar, bahwa ada unsur hak dasar warga yang tidak boleh diabaikan negara atas air, komersialisasi air dipandang hanya akan menghilangkan hak dasar ini, selebihnya ada alasan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah bahwa keyakinan agama tentang perlindungan atas air begitu kuat, hal ini dianut oleh para orang tua dan ‘alim ‘ulama yang

mengkategorikan perlawanan ini sebagai bentuk jihad mempertahankan ketersediaan air di tanah Padarincang. Inilah konsep dasar yang kontradiktif dengan pemikiran Feuerbach yang menurutnya, bahwa dalam agama, orang berpartisipasi seolah-olah berada dalam dunia khayal yang tidak nyata tentang keharmonisan, keindahan, dan kepuasan diri, padahal dia hidup di dalam dunia sehari-hari yang praktis, di mana masih ada kesengsaraan dan penderitaan. (Giddens, diterjemahkan oleh Kramadibrata, 2007:6). Akan tetapi tindakan ulama di Padarincang, selaras dengan pemikiran Hegel yang memandang ‘yang benar-benar’ (real) sebagai sumber dari ‘yang bersifat Tuhan’ (divine) (Giddens, diterjemahkan oleh Kramadibrata, 2007: 4).

Gerakan Sosial Masyarakat Padarincang

1. Menggalang Kepercayaan dan solidaritas Masyarakat

a. Kearifan Lokal Masyarakat Padarincang

Setidaknya ada tiga hal mengapa terjadi perlawanan secara konsisten dari warga. *Pertama* (1). Kesadaran

teogeologis dibenak publik, bahwa air bukan hanya sebatas sumber kehidupan sebagai warisan dunia yang harus dipertahankan tetapi juga merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan dibela dari bentuk-bentuk pengrusakan oleh orang atau perusahaan atau negara sekalipun, yang memprivatisasi sumber daya alam demi keuntungan sendiri dan berjangka pendek.

Dalam keyakinan masyarakat Padarincang, Allah telah menurunkan air sesuai takaran dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan keserakahan manusia Allah pula berkuasa menghilangkannya (Q.S: 23:18), ayat ini merupakan penegasan bahwa privatisasi air yang berorientasi pada eksploitasi berskala besar hanya akan menciptakan kerusakan bumi (*fasadu filard*), eksploitasi merupakan bentuk keserakahan dan sikap berlebihan yang hanya melekat dalam karakter setan. Jihad melawan setan ini adalah perlawanan sepanjang hidup manusia islam. Ditambah penelusuran sejarah berdirinya ~~Daone~~ yang pertama kali didirikan oleh orang Yahudi, yaitu Isaac Carasso (<http://id.m.Wikipedia.org>, diakses 7 Februari 2013 pkl. 12.17 Wib). Maka isu Dajjal dan Yahudi

mewarnai semangat perlawanan masyarakat Padarincang. Isu ini diantaranya tertulis dalam spanduk “Danone adalah Dajjal. Musnahkan Dajjal dari Tanah Padarincang”

Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan fungsi air beserta etika bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar tanpa menimbulkan kekeringan atau kerusakan lingkungan. Bagi umat Islam, air dapat dimanfaatkan sebagai sarana beribadah kepada Allah, menggunakannya sesuai kebutuhan dan merupakan hak dasar bagi seluruh makhluk hidup di seluruh permukaan bumi (Q.S: 27:60), dalam konteks kewarganegaraan, air adalah hak dasar warga yang harus dikelola dengan baik oleh negara hal ini menandakan bahwa terdapat kearifan lokal yang berlaku ditengah masyarakat untuk menjaga ketersediaan air bagi kelangsungan kehidupan. Hak inilah yang Ustadzah Eha tegaskan, “kekeringan selain akan menghambat kehidupan ekonomi juga akan menghambat peribadatan kepada Allah, karena kesulitan untuk berwudhu. Ketika masih banyak air saja orang sudah banyak yang meninggalkan shalat, apalagi jika tidak air, maka akan

semakin beralasanlah orang untuk tidak melakukan shalat dan ibadah lainnya”.

Masyarakat Padarincang yang telah memahami teks Al-Quran tentang keharusan melindungi air dari segala bentuk privatisasi dan komersialisasi telah pula menyadari betapa negara dalam kasus ini Pemerintah Daerah Serang bukan hanya telah mencederai hak dasar warga secara kontekstual tetapi juga bertolak belakang dengan semangat menjalankan amanah secara tekstual yang termaktub dalam Al-Qur'an. Pilihan untuk menghentikan upaya komersialisasi air mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk mencabut surat izin yang diberikan kepada PT Tirta Investama, membendung proyek eksploitasi air atas nama investasi sesungguhnya bentuk kesadaran berQuran dalam konteks jihad melawan kekeringan air. Ideologi perlawanan terhadap privatisasi air oleh Danone ini adalah rangkaian sejarah panjang melawan kehadiran kompeni (company) yang telah menguras seluruh sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini.

Aspek teogeologis ini berasal dari budaya dan nilai-nilai adat mayoritas penduduk Provinsi Banten,

memiliki semangat religius keislaman yang kuat dengan tingkat toleransi yang tinggi (www.Propinsi.Banten.Com, diakses 6 Februari 2013, pkl 13.15 Wib). Nuansa religius ini sangat kental mewarnai gerakan masyarakat Padarincang. Mulai sharing berbagai informasi dengan kiyai kenamaan Barugbug dan Banten, Kiyai Mufasir, seluruh ulama se-Kecamatan Padarincang dan Banten baik perempuan maupun laki-laki, dan dengan menamai dan melakukan momen pergerakan yang selalu bernuansa islami, seperti acara istighosah yang digelar sebanyak tiga kali, tabligh akbar, dan yasinan.

Istighosah sendiri menurut para ahli bahasa Arab, termasuk jenis *an-nida* (panggilan/seruan), yang secara bahasa berarti meminta al-ghouts, yang berarti meminta kepada Allah untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, sama dengan kata al-isti'anah yang berarti meminta pertolongan.

Ibnu Jarir Ath-Thabari Rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Swt (<http://gicara.com>, diakses 7 Februari 2013, pkl. 12:19 wib):

“(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan (beristighosah) kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut” (QS. Al-Anfal, 8:9). Adapun perbedaan antara do’a dan istighosah adalah, istighosah hanya dikhususkan pada permohonan dalam keadaan sulit dan susah, sedangkan do’a lebih umum, karena bisa dilakukan dalam kondisi lainnya. Oleh karena itu semua bentuk istighosah termasuk do’a, tapi tidak semua doa disebut istighosah.

Dalil-dalil istighosah antara lain:

Allah Swt. Berfirman:

“Atau siapakah yang memperkenankan (do’a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa, kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khafilah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingat (Nya)” (QS. An-Naml/27;62)

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh

kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.” (QS. An-Nahl/16:53)

“jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha penyayang (QS.Yunus/10:107).

Warna inilah yang kemudian dipercaya oleh masyarakat Padarincang wewarnai Yasinan dan doa brsama yang berakhir amuk massa pada tanggal 10 Desember 2010. Masyarakat dan juga beberapa orang wartawan dan polisi menurut Yani banyak yang melihat tangan-tangan malaikat dan orang yang memakai baju serba putih dengan sorban dan janggut putih, membantu masyarakat Padarincang melawan Danone. Bahkan Kiyai Mufasir yang saat itu tidak turun ke lapangan, banyak masyarakat yang melihatnya berada dilokasi. Abdul Azis tidak dapat membenarkan peristiwa ini secara logika, tapi dapat dipahami bahwa ini

adalah tentang keyakinan spiritual. Adalah bagian dari janji Allah, jika do'a kita diterima. Dan janji Allah adalah pasti, seperti yang difirmankan-Nya pada surat Al-Anfal, 8:9, bahwa: “Allah akan mendatangkan seribu malaikat untuk membantu”. Bahkan pada zaman Nabi, keajaiban-keajaiban tersebut sering muncul. Misal, ketika pasukan gajah akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba diatas langit, sekelompok pasukan burung utusan Allah membawa batu-batu api yang akhirnya memporakporandakan pasukan gajah. Ini adalah bentuk kekuasaan Allah.

b. Meminta Restu Sesepuh (ulama)

Setelah memiliki berbagai bekal pemahaman dan bukti yang menguatkan tentang isu yang dihadapi, kemudian berbagi atau berkonsultasi dengan sesepuh ulama, karena masyarakat padarincang sangat mempercayai sesepuh ulama ini. Pada tahun 2008, seperti diungkapkan oleh ustadzah Eha, ulama se-Kecamatan Padarincang sepakat menolak secra bulat kehadiran Danone. Meskipun diakui, kemudian, banyak para ulama yang akhirnya berposisi kebalikannya. Menurut beliau, karena pengaruh uang sangat besar dalam kasus ini. Banyak para ulama

yang kemudian lebih memilih uang daripada mempertahankan perjuangannya. Hubungan uang dengan para ulama memang sangat besar. Misalnya, ada hibah bagi Pondok Pesantren Salafiyah, mencapai besaran 120 juta rupiah. Ada dana pembangunan mencapai 15 juta rupiah, ada bantuan Al-Qur'an, dst. Semua prosedur tersebut melalui jalur kedekatan birokrasi dengan rekomendasi dari Bupati atau Gubernur. Selain itu, juga ada tawaran langsung dari pihak yang pro Danone, dalam hal ini diwakili oleh H. Hariri, yaitu tawaran dengan besaran milyaran rupiah, berkisar diangka 4-5 milyar. Hal ini juga dibenarkan oleh H. Akhsan, yang mendapat tawaran serupa. Hal ini kemudian yang justru membuat geram ustadzah Eha, baik kepada pihak Danone maupun kepada para ulama yang telah menggadaikan jihad demi proposal dan uang. Abdul Aziz membenarkan hal demikian, dan menyebutnya kiayi proposal.

Analisis khalayak sangat perlu dilakukan oleh agent of change. Kesimpulan dari analisis khalayak yang didapat dari faktor sosiokultural masyarakat padarincang adalah bahwa masyarakat sangat mempercayai adanya dan petuah sesepuh ulama. Maka

strategi yang pertama kali dilakukan adalah mendiskusikan keadaan dan peristiwa yang terjadi terkait dengan keberadaan pabrik aqua Danone sesuai dengan analisis ilmiah dan empirisnya terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian sumberdaya air ke depannya dengan sesepuh ulama yang sangat dipercaya oleh masyarakat Padarincang, yang juga memiliki pengaruh sangat luas di Provinsi Banten melalui karisma dan kredibilitasnya. Kemudian hal ini diakui oleh para agent of change sebagai modal sangat besar dalam pergerakan massa di Padarincang. Meskipun isu agama tidak bisa dikatakan sebagai isu yang lebih besar pengaruhnya dalam perjuangan sosial ini.

Untuk memperlihatkan keberadaan gerakan, digelarlah sebuah silaturahmi dan konsolidasi akbar seluruh masyarakat yang disebut Rapat Umum GRAPPAD dengan tema: "Kejahatan yang Terorganisir Dapat Mengalahkan Kebenaran yang Tidak Terorganisir/Tidak Kompak". Hal ini untuk mempertemukan dan berbagi konsep dan tujuan yang bisa dipegang bersama mengenai gerakan yang tengah diperjuangkan, antara masyarakat umum, tokoh masyarakat, ibu-ibu,

pemuda, dan mahasiswa. Dalam acara ini digelar do'a bersama yang dipimpin oleh sesepuh ulama Kampung Barugbug Desa Ciomas. Seperti yang diungkapkan oleh Yani, hal ini bertujuan selain untuk mensolidkan pandangan dan tujuan dari jihad yang sedang dilakukan, juga agar yang sudah yakin semakin yakin, yang sudah tahu jadi yakin, yang belum tahu jadi tahu, dan semuanya saling menginformasikan pengetahuan dan keyakinannya pada yang lain. Yang membuat luarbiasa acara ini adalah kehadiran ulama besar Banten, terutama ulama besar bagi warga Ciomas, yang selama ini tidak pernah meninggalkan pendoponya untuk urusan dunia, kecuali untuk mensolatkan mayit.

Tanpa mengecilkan ulama lainnya, tetapi kehadiran sosok Kiayi Mufasir, mengkomunikasikan adanya sesuatu yang sangat penting, yang sangat besar untuk diperjuangkan dan memang ini adalah panggilan jihad untuk semua masyarakat Padarincang. Inilah restu terbesar bagi pergerakan ini. Lokasi yang dipilih untuk konsolidasi akbar ini adalah Madrasah yang berada dipinggir jalan raya besar di Desa Ciomas. Dengan mendirikan tenda dan banyak kerumuman massa, tentu saja

sangat mencolok perhatian penduduk sekitar atau para pendatang yang hilir mudik berkendara. Sehingga menimbulkan kepenasaran tersendiri, menciptakan rasa ingin tahu yang besar, dan inilah saatnya terjadi perluasan informasi.

Bahwa keadaan ini harus diperjuangkan. Ini adaah tanggung jawab kita bersama untuk mempertahankannya. Salah satu petuahnya adalah jika tidak bisa jalan tol, maka kita harus melakukannya melalui jalan tikus. Inilah kemudian yang menjadi pedoman nuansa spiritual yang sangat kental dalam pergerakan ini. Sampai-sampai pada puncak gerakan tanggal 10 Desember yang berakhir demo dan amuk massa, yang dihadiri sampai 16000 warga dari seluruh Propinsi Banten, melihat dan merasakan sendiri bagaimana nuansa spiritual ini hadir berupa tangan-tangan malaikat yang membantu aksi massa tersebut.

Interpretasi atas petuah sang ulama dilakukan oleh Agent of change dijabarkan dalam dua aspek praktis, yaitu jalan tol melalui jalur birokratis, karena masalah Danone adalah masalah menyangkut kebijakan. Selalu sharing

dan minta restu ulama agar didoa'kan kepada Allah keberhasilannya dan dihilangkan kesulitannya, dalam islam dibolehkan, termasuk macam istighosah Masyru'ah (istighosah yang disyariatkan dalam agama islam) dalam bentuk istighosah kepada orang yang masih hidup dan ada dihadapan kita, dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh manusia pada umumnya (<http://gicara.com>, diakses tanggal 7 Februari 2013 pk1. 12.32 wib), Yaitu dengan adanya izin dari pemerintah provinsi Banten dan Kabupaten Serang. Jalur birokrasi ditempuh sejak tahun 2008 oleh masyarakat padarincang. Jalur ini ditempuh melalui dialog, audiensi, dan pengiriman surat pernyataan penolakan masyarakat Padarincang dengan meminta agar izin pendirian dicabut. Masyarakat padarincang telah menyambangi DPRD, pemerintah kabupaten serang, dan pemerintah provinsi kabupaten. Begitu juga pada gerakan jilid 2 pada tahun 2010. Bahkan mencapai sampai ke presiden, meskipun tidak ada respons dan hasil.

Kedua (2), Kesadaran historis bahwa bangsa ini pernah dijajah ratusan tahun lamanya. Sebelum masa kemerdekaan masyarakat Indonesia

pernah terlibat dalam peperangan menghadapi kompeni (*Company*) yang diterjemahkan sebagai penjajah yang menindas dan memperlakukan pribumi sebagai budak yang tidak memiliki derajat. Bangsa Indonesia telah diperas dimana seluruh sumber daya alamnya telah dikuasai kompeni saat itu (dok. GRAPPAD). Penjajahan membentuk persoalan relasi “dominasi-subordinasi” mulai dari level makro sampai mikro, mulai dari antar negara sampai dengan antar level masyarakat dan bahkan sampai dengan antar jenis kelamin, sebagai ciri berpikir dualis (*biner*) yang mengendap dalam ilmu pengetahuan Barat, terutama dalam kajian masalah timur (*orientalism*), dengan menempatkan kedudukan Barat, penjajah, self, pengamat, dan subjek memiliki posisi yang unggul dibandingkan timur. Timur adalah terjajah, orang luar, objek, yang diceritakan, irasional, dan kurang beradab.

Masyarakat Padarincang bangkit mendekonstruksi semua model tersebut, melalui perlawanan terhadap kompeni (company) multi nasional dan Internasional Danone, menunjukkan bahwa “dunia ketiga” tidaklah seragam. Ada heterogenitas baik karena wilayah,

manusia dan kultur. Juga menunjukkan ada resistensi tertentu dari Timur ke Barat (Leela, 2006). Gerakan ini menyediakan kerangka untuk mendestabilisasi bahwa ada asumsi tersembunyi yang melekat dalam pemikiran Barat yang selalu mengklaim sebagai kebenaran tertinggi juga universal. Pengetahuan tentang investasi dan pembangunan dibantah habis oleh masyarakat Padarincang dengan isu komersialisasi, privatisasi, dan kapitalisme. Tujuannya untuk melawan sisa-sisa dampak dari terjadinya kolonialisme dalam pengetahuan termasuk pada sisi kultur, agar terwujudnya tata hubungan dunia yang baru di masa depan (kuliahsosilogi.blogspot.com. diakses tgl 7 Januari, 2012 pk1 10.34)

Teori poskolonialisme diadopsi oleh masyarakat untuk mengeksplorasi pengalaman, penindasan, perlawanan, ras, gender, representasi, perbedaan, penyingkiran, dan migrasi dalam hubungannya dengan wacana-wacana penguasa Barat mengenai sejarah, filsafat, *sains* dan *linguistik*. Teori poskolonialisme memperjuangkan narasi-narasi kecil, membangkitkan kesadaran bahwa penjajah bukan semata-mata dalam bentuk fisik

melainkan juga secara psikologis yang tidak hanya berdampak dalam segi ekonomi tapi juga dalam hal budaya. Hegemoni penjajah yang luar biasa dan persinggungan *pluralisme* budaya yang telah banyak menyuguhkan persoalan etnis, khususnya di daerah rawan konflik, menjadi kajiannya.

Ustadzah Eha menilai, bahkan ketika Danone belum didirikan dan dioperasikan, telah menyebabkan konflik Horizontal dan vertikal dalam masyarakat. Terdapatnya dua kelompok masyarakat yang pro dan kontra membuat kehidupan masyarakat yang tenang dan damai menjadi mencekam. Intimidasi, jawara, hubungan antar keluarga menjadi pecah, rakyat gelisah, penculikan warga, perselisihan dan persaingan. Kepala desa dan masyarakat tidak harmonis, lurah yang pro Danone memaksa dan mengintimidasi warga yang kontra, juga membeli suara warga. Pengajian-pengajian menjadi tempat yang disorot oleh pihak yang pro, karena pengajian dianggap sebagai tempat yang strategis oleh pihak yang kontra untuk menyebarkan informasi dan menggalang suara masyarakat.

Polisi menjadi penculik masyarakat, Gubernur dan Bupati menjadi lawan bersama masyarakat

karena kebijakannya, para ulama dan masyarakat banyak yang tidak harmonis, karena banyak ulama yang pro dan banyak ulama yang kontra, keduanya saling bersaing dalam memegang prinsip dan kepentingannya, Camat dan warga berkonflik, dengan diculiknya Camat sebagai jaminan untuk dipertukarkan dengan warga yang diculik oleh Polisi.

Masyarakat Padarinacang, juga Fanon menyimpulkan, bahwa adanya kolonialisasi melahirkan aliensi dan marginalisme psikologis yang sangat hebat. Secara psikologis, sebagai objek penderita di tengah dominasi. Kolonialisme memberikan dampak *inferiority complex*, yaitu perasaan *depended*, tidak percaya diri, menyebabkan kemunduran kepribadian, reduksi karakter, dan *lost identity*. Bhabha juga menekankan bahwa apa yang dihadirkan di dunia saat ini adalah perwujudan representasi dari budaya hibrid. Identitas dari dijajah dan penjajah secara konstan berubah terus menerus dan saling mendukung, yang akhirnya memunculkan homogenitas budaya, akibat adanya penyerapan budaya Barat oleh negara-negara timur. Postkolonial dapat pula disebut sebagai ancaman teoritis untuk

mendekonstruksi pandangan kaum kolonialis Barat yang merendahkan timur atau masyarakat jajahannya. (www.jurnalnet.com. Diakses tgl 7 Januari 2012 pkl. 10.53)

Teori postkolonial mewujud untuk memberikan kesadaran akan pentingnya identitas kebangsaan, pentingnya nilai-nilai kemerdekaan dan juga humanisme. Jadi, teori ini lahir untuk membongkar relasi kuasa yang membungkus struktur yang didominasi oleh hegemoni kolonial. Inti kritik dari postkolonial (terhadap kolonialisme) sesungguhnya bukan dalam bentuk penjajahan secara fisik yang telah melahirkan berbagai kesengsaraan dan penghinaan hakekat kemanusiaan, melainkan pada bangunan wacana dan pengetahuan termasuk bahasa (Ratna, 2008), dengan penaklukan pikiran, jiwa dan budaya; dan dikotomi (Barat-Timur, superioritas-inferioritas, dll) yang merupakan simplifikasi yang menyesatkan (Moore & Gilbert, 2000).

Ustadzah Eha menilai, bahkan ketika Danone belum didirikan dan dioperasikan, telah menyebabkan konflik Horizontal dan vertikal dalam masyarakat. Terdapatnya dua kelompok masyarakat yang pro dan kontra membuat kehidupan masyarakat yang

tenang dan damai menjadi mencekam. Intimidasi, jawara, hubungan antar keluarga menjadi pecah, rakyat gelisah, penculikan warga, perselisihan dan persaingan. Kepala desa dan masyarakat tidak harmonis, lurah yang pro Danone memaksa dan mengintimidasi warga yang kontra, juga membeli suara warga. Pengajian-pengajian menjadi tempat yang disorot oleh pihak yang pro, karena pengajian dianggap sebagai tempat yang strategis oleh pihak yang kontra untuk menyebarkan informasi dan menggalang suara masyarakat.

Polisi menjadi penculik masyarakat, Gubernur dan Bupati menjadi lawan bersama masyarakat karena kebijakannya, para ulama dan masyarakat banyak yang tidak harmonis, karena banyak ulama yang pro dan banyak ulama yang kontra, keduanya saling bersaing dalam memegang prinsip dan kepentingannya, Camat dan warga berkonflik, dengan diculiknya Camat sebagai jaminan untuk dipertukarkan dengan warga yang diculik oleh Polisi.

Kompeni begitu sangat familiar dalam benak Bangsa Indonesia tanpa diterjemahkan dengan baik apa arti sesungguhnya oleh karena keterbelakangan dan kebodohan

komunal dalam kurun waktu yang sangat panjang. Kompeni memanfaatkan kekuasaan para demang untuk mendapatkan legitimasi eksploitasi sumber daya alam sekaligus menyiksa pribumi dengan menjadikannya tenaga kerja tanpa bayaran dan kelayakan hidup. Hidup dalam ketertindasan, kemiskinan dan kebodohan cukup menjadi alasan bangsa ini merupakan *inlender* tanpa masa depan.

Kompeni modern yang dihadapi masyarakat Padarincang adalah Perusahaan Aqua Danone, berawal sejarah dari negeri Belanda, dengan memanfaatkan demang para pemangku kekuasaan jabatan baik di tingkat pemerintah (Gubernur dan Bupati, juga para dewan (Hasan Maksud) dan segenap jajarannya yang terlibat, termasuk polisi-polisi yang mengintimidasi dan menculik warga, serta para pengusaha seperti Hariri beserta anak buahnya), dalam berusaha memperoleh legitimasi yang akan mengeksploitasi sumber daya air di Cirahab – Padarincang. Hal inilah yang sejak tahun 1950-an ke atas juga telah berusaha diperangi oleh Soekarno, yang disebutnya, neo kolonialisme, neo imperialisme, yang menurut Soekarno

harus diperangi (Kompas TV, 6 Februari, 2013, dalam acara *in memuar*).

Kebodohan dan kemiskinan menjadikan pribumi ditindas dan dijadikan budak. Masyarakat yang pro Danone percaya dengan janji bahwa mereka akan direkrut sebagai karyawan setelah Danone beroperasi, terutama karena sudah mengisi formulir perekrutan. Mereka yang tersebar pada beberapa desa di wilayah Kecamatan Padarincang, dijanjikan sebanyak 2000 orang akan direkrut menjadi pegawai. Padahal pada Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicantumkan dengan jelas pada poin romawi 3 (tiga) bahwa rencana penggunaan tenaga kerja Indonesia : 174 orang. Dan pada perihal pengesahan *site plan* pembangunan industri air minum yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Serang, pada poin sepuluh (10) dituliskan: penggunaan tenaga kerja, agar diupayakan/diprioritaskan dari masyarakat/penduduk daerah setempat di sekitar lokasi proyek, sesuai dengan tingkat keahlian yang dibutuhkan. Yang artinya, penduduk setempat hanya akan

bekerja sebagai budak, menjadi satpam, atau pekerjaan buruh kasar lainnya, karena yang diiming-imingi menjadi karyawan adalah bapak-abpak atau pemuda yang tidak lulus SD atau hanya lulusan SD. Dan jika butuh ahli, mereka akan mengambil pekerja dari luar daerah atau dari tenaga kerja asing. Artinya, perekrutan karyawan penduduk setempat akan jauh di bawah angka 174 orang.

Kesadaran akan masa depan pada akhirnya telah menyulut perlawanan sengit bangsa ini atas segala bentuk penindasan dan eksploitasi seluruh sumber daya alam yang dimiliki. Kompeni yang lambat laun telah dipahami sebagai perusahaan besar dari negeri Belanda dengan kekuatan senjata harus diusir, bangsa Indonesia harus mengakhiri era penjajahan dengan kemerdekaan sejati, kemerdekaan untuk mengelola sumber daya alam sendiri dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan bangsa sendiri yang akan diwariskan pada anak cucunya kelak.

Ketiga (3), kesadaran hak dasar atas air, jika negara tidak lagi mampu mengakomodasi kepentingan publik oleh karena telah kehilangan peran

dihadapan kedigjayaan pasar global dan lingkaran setan kapitalisme maka tinggal satu benteng pertahanan terakhir, benteng yang barangkali tidak memiliki persenjataan lengkap bernama kebijakan, benteng yang hanya mengandalkan kekuatan moral dan dorongan nurani demi mempertahankan hak-hak dasar warga yang terdesak oleh gempuran privatisasi dalam berbagai sektor sumber daya alam, benteng yang kerap rapuh secara hukum tetapi tangguh dalam memanfaatkan momentum, memiliki legitimasi dan solidaritas korban dampak yang berpengaruh dalam menjungkirbalikkan kenyataan oleh karena di dalamnya terdapat prinsip universal bernama hak asasi manusia, jika benar ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara, maka negara tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena negara idealnya harus memenuhi segala bentuk kebutuhan dasar warga dan hak asasi manusia ini.

2. Menggalang Networking Eksternal: NGO, Media, LBH dan lainnya

NGO dan LBH. Sosialisasi dan diskusi materi yang berhubungan dengan keberadaan Pabrik Aqua Danone dilakukan oleh agent of change

masyarakat Padarincang dibantu dari NGO dari WALHI, KRUHA, KONTRAS agar kevalidan informasi yang disampaikan ke masyarakat tinggi. Salah satu materi dalam sosialisasi dan advokasi adalah slide-slide berupa film, yang diunduh dari berbagai sumber, seperti internet, media, hasil survey ke Sukabumi, maupun sumber lainnya, seperti dokumen-dokumen yang dikumpulkan di atas, kemudian disarikan dan dibuat film, sebagai bahan sosialisasi audio visual. Sehingga mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat.

Relasi dengan LBH Jakarta dengan 45 pengacara selain memiliki fungsi untuk memberikan pandangan secara hukum baik dari segi dokumen maupun dari setiap faset gerakan massa. Masyarakat menyadari, setiap pelibatan massa akan selalu berhubungan dengan masalah hukum. Ini terbukti saat peristiwa puncak 10 Desember, istighosah akbar yang berbuntut amuk massa pada lokasi pendirian pabrik Danone, berbuntut pencekalan atau tepatnya penculikan, terhadap kurang lebih 59 sasaran target yang dilakukan oleh Polres Serang, meskipun hanya 7 orang masyarakat yang berhasil diciduk. Kenapa diciduk? Karena dilakukan pada

jam 02.00 dini hari. Para warga yang dididuk dimasukkan ke dalam sel tahanan Polres Serang. Keadaan ini telah disadari oleh para aktivis, karenanya telah dikonsultasikan dengan para pengacara.

Relasi media. Yang tak kalah pentingnya adalah relasi dengan media. Sejak awal pergerakan ini dimulai, para aktivis mejalin relasi dengan media massa,. Tidak tanggung-tanggung, media massa yang diakses melibatkan media massa lokal dan nasional, cetak dan elektronik. Ini diperoleh dengan memanfaatkan relasi yang dimiliki oleh para aktivis. Misalnya H. Daefullah, beliau memiliki relasi yang kuat dengan persatuan wartawan indonesia.

Diakui oleh H. Daefullah, bahwa tanpa media, gerakan ini tidak akan berhasil. Karena medialah gerakan ini menjadi besar, diketahui banyak orang, dan akhirnya menimbulkan banyak simpati dan dukungan. Ada tim khusus pemantau media, dan menurutnya, selama gerakan dimulai, tidak ada satupun pemberitaan yang merugikan masyarakat padarincang. Karena medialah tujuan gerakan bisa sampai keskala nasional dapat tercapai. Bahkan mencapai media internasional. Hingga tulisan ini dibuat, banyak NGO-NGO

asing yang tertarik dengan kasus ini bahkan, saat peneliti mengumpulkan data, dikatakan oleh narasumber, bahwa mahasiswa thailand pun sedang meneliti kasus ini.

Dikatakan oleh Abdul Aziz, bahwa relasi dengan banyak tokoh dan organisasi juga salah satunya didapat melalui pantauan media. Para aktivis memonitor dan menilai apa yang diucapkan setiap orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dinilai cari muka, atau misi lain yang tidak murni dan tidak sejalan dengan pergerakan, dianggap angin lalu. Jika dinilai sejalan dengan nilai perjuangan masyarakat padarincang, maka selanjutnya dikontak sebagai relasi. Oleh karenanya, gerakan masutarakat adarincang juga memiliki orang-orang yang peduli dari kalangan lembaga legislatif maupun eksekutif. Manfaat dari terbinanya relasi ini adalah sebagai corong informasi yang dilakukan pihak pemerintah mengenai isu atau gerakan yang berkembang. Sehingga masyarakat padarincang bisa merumuskan langkah yang tepat, yang bisa merespons apa yang dilakukan pihak pemerintah.

Selain itu, pendekatan terhadap ajaran pemerintahan atau birokrasi juga

dilihat dari setiap masing-masing pejabat. Jika demikian masih menyangkut daerah-daerah yang memiliki hubungan kepentingan dengan keberadaan dan kelstarian sumber mata air Cirahab, maka diupayakan dikonak sebagai relasi.

Mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bersih dari kepentingan rakyat. Generasi muda yang akan mewarisi segala bentuk kehidupan dan segala aspeknya. Suara mahasiswa diperlukan untuk memperkuat basic suara ditingkat kabupaten. Perpanjangan tangan gerakan masyarakat padarincang yang berkedudukan ditingkat kabupaten. Namun, seperti yang diakui Abdul Aziz, sayang, tingkat kepedulian mahasiswa sangat rendah. Hamas (himpunan mahasiswa Serang), Himpunan Mahasiswa Palima Cinangka (HIMAPALKA), HMI, KAMMI, tidak merespons dengan baik. Semua pada akhirnya datang dan bergabung ketika isu ini sudah ramai. Bahkan banyak organisasi lain seperti FPI, dll., mengajak turut bergabung dan menyumbangkan massanya. Seperti yang dikatakan Ustadzah Eha, ketua FPI, Al-Habib Muhammad bin Rizieq Shihab Asy-Safi'i atau biasa disebut Habib Rizieq langsung menelpon beliau

untuk menawarkan bantuannya, dalam membantu membereskan masalah Danone yang ada di Padarincang. Namun baik Ustadzah Eha maupun H. Daefullah yang sempat didatangi utusan FPI dan berdiskusi langsung sepakat menolak bantuan FPI, karena dirasa Padarincang masih mampu untuk memperjuangkan haknya sendiri. Masyarakat Padarincang, ingin bangga dengan perjuangannya dan keberhasilannya. Dan menjadikan momen pergerakan ini sebagai upaya memperteguh perasaan saling memiliki dan mempertahankan atas nama persaudaraan dan tuntunan agama seluruh masyarakat, sekaligus untuk mengenal orang-orang sekitar lingkungan hidupnya, mana yang kawan dan mana yang lawan. Meskipun setelah dua tahun berlalu, Ustadzah Eha mengadakan silaturahmi antar kelompok-kelompok yang berbeda antara yang pro dan kontra dalam masalah Danone, sudah terjalin kembali. Meskipun untuk beberapa orang dari golongan ulama, Camat, Hariri dan Bupati diakuinya, masih susah untuk biasa. Seperti, Ustadzah belum mau hadir di pengajian bulanan di pendopo Bupati. Juga saat diminta ceramah saat ada ibu Atut di Padarincang, padahal akan di bayra 5

juta. Meskipun sudah mau mengisi ceramah di kecamatan.

Yang ditakutkan Ustadzah Eha adalah karena kekhawatiran pemanfaatan secara politis dikemudian hari, karena warga masyarakat Padarincang yakin bahwa perjuangan belum berakhir. Sampai detik ini izin pendirian Danone belum dicabut, meskipun telah juga melayangkan surat permohonan pencabutan izin pendirian Danone melalui SK Bupati Serang Taufik Nuriman, setelah tidak juga digubris oleh pemerintah setempat, baik ditingkat kabupaten maupun provinsi. Ustadzah Eha mengatakan jika nanti ada foto beliau dibelakang Gubernur Atut atau ada Atut dibelakangnya, nanti akan dipersepsikan ada kedekatan secara politis. Begitu juga saat lurah desa Citasuk, Iming yang adalah adik kandung H. Hariri, mengundangnya untuk berbincang dirumahnya setelah ustadzah Eha selesai berceramah, Ustadzah Eha hanya menunggu Lurah Iming di depan pintu gerbangnya selama 5 menit, setelah Lurah Iming tidak muncul, beliau langsung pergi. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa ia mendekati atau masuk menjadi bagian dari massanya Iming. Jika beliau sampai

masuk mengetuk pintu iming, maka beliau yang merapat dan menawaakan diri. Secara politis itu akan berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat yang mempercayainya akan kebersamaan dalam perjuangan mempertahankan hak atas air dan lingkungannya. Demikianlah yang dilakukan ustadzah Eha demi menjaga kemurnian gerakan ini.

Demi menjaga kemurnian gerakan, para aktivis masyarakat Padarincang, harus menolak berbagai tawaran dari pihak-pihak yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan masyarakat padarincang, sehingga efeknya, banyak kesimpangsiuran akan aktor dari gerakan masyarakat Padarincang ini. Ada yang mengklaim dan bahkan banyak pihak yang mengklaim bahwa ini adalah gerakannya. Klaiman ini bahkan banyak ditulis di media massa atau seperti di jurnal Walhi sendiri. Di sebutkan oleh Abdul Aziz bahwa ada yang mengaku bahwa ia adalah aktor dari gerakan ini, dan menuliskannya di jurnal Walhi, padahal ia hanya datang sekali ke masyarakat Padarincang, dan tidak memberikan kontribusi apa-apa. bahkan yang ia tulis di jurnal Walhi adalah tulisannya Abdul Aziz. Mengenai peristiwa ini, H. Daefullah

justeru merasa bahwa ini adalah sebuah keberhasilan bagi gerakan sosial masyarakat Padarincang, bahwa semua menjadi samar. Oleh karena itu sangat sulit untuk dipatahkan. Tidak ada yang bisa dituduh sebagai biang kerok, karena ini adalah gerakan sosial kemasyarakatan. Social movement. Dan tidak ada yang bisa menangkap atau mengadili seluruh massa.

2. Masyarakat Politik

Berikut kronologis gerakan masyarakat melalui jalur birokrasi:

1. Pertemuan di Le Dian yang difasilitasi PT. Trta Investama menemui jalan buntu, karena, seperti penuturan Husni Mubarak, pertemuan yag dilakukan bukan dengan itikad baik, tetapi hanya merupakan strategi untuk melunakkan gerakan penolakan Radar Banten, 13 Juni 2008, dalam draft dokumen Grappad).
2. Tanggal 30 juni 2008 warga melakukan audiensi dengan bupati Serang, Ahmad taufik Nuriman. Dalam pertemuan tersebut warga mendesak agar bupati mencabut surat izin yang

diberikan kepada PT. Tirta Investama.

Dihadapan perwakilan warga yang terdiri dari para alim ulama, tokoh masyarakat, pemuda, kalangan LSM dan mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut Taufik Nuriman mengatakan jika rencana pembangunan pabrik ini hanya akan menimbulkan suasana tidak kondusif di tengah-tengah masyarakat pihaknya bersedia untuk mencabut izin lokasi tetapi ia berharap kepada masyarakat agar memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyampaikan hasil kajian, jika tidak ada dampak buruk yang akan merugikan maka masyarakat harus bekerjasama untuk memuluskan rencana pembangunan tersebut. Ini menunjukkan, bahwa pemerintah tidak memiliki itikad politik mengenai isu-isu lingkungan terkait dengan ancaman kekeringan air (Tipikor edisi 3 Th1/1-15 Agustus 2008 dalam dokumentasi Grappad)

3. Masyarakat menghadiri ekspose hasil studi amdal yang digelar di aula Setda II Kabupaten Serang.

Dalam ekspose ini warga mencurigai bahwa ekspose hanya merupakan ritual korporasi, agar tampak ilmiah dan tidak terjadi kekeringan dan tidak merugikan masyarakat, dengan menyatakan bahwa perusahaan hanya akan mengambil air bawah tanah dan tidak akan mengganggu eksistensi air permukaan, bahkan perusahaan sudah mempersiapkan program penghijauan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeringan. Untuk inilah seperti yang dinyatakan oleh H. Daefullah dan Abdul Aziz, pentingnya mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah air bawah tanah dan permukaan, tentang sumber daya air, dan tentang bagaimana cara kerja Danone, sehingga masyarakat dapat kritis menanggapi setiap pernyataan yang dilontarkan oleh pihak perusahaan maupun pemerintah. Bahkan masyarakat

mencurigai bahwa amdal yang diekspose adalah sebuah rekayasa ilmiah, dengan para pakar yang dapat diminta pendapatnya sesuai dengan kepentingan dan tujuan mereka. Hal ini telah diantisipasi sebelumnya oleh masyarakat, melalui kerjasama dengan WALHI, untuk sama-sama mengkaji Amdal dari proyek Danone ini, sehingga masyarakat juga memiliki pendapatnya sendiri tentang kajian Amdal mana yang dapat dipercaya, dan netral, benar-benar ilmiah. inilah kemudian yang menjadi pegangan kebenaran hasil Amdal oleh masyarakat. Seperti ustadzah Eha nyatakan, bahwa masyarakat kini sudah pintar, banyak cara untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan, meskipun tidak memiliki pendidikan tinggi. Ada televisi yang hadir 24 jam di rumah, ada internet yang bisa memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan, dan ada handphone untuk saling bertukar informasi

terbaru, selain pertemuan tatap muka.

4. Audiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Serang, 5 Agustus 2008 diterima oleh Akhmad Riva'i, yang menyatakan jika pihaknya baru mengetahui dari DPLH yang menuturkan bahwa izin operasi belum diberikan karena AMDAL-nya masih dalam proses penyelesaian. Madsukra menambahkan untuk sementara waktu tidak boleh ada aktifitas pembangunan mengingat pihak perusahaan belum mendapatkan seluruh izin termasuk AMDAL yang belum selesai dibuat.

Kesimpulan

Masyarakat Padarincang yang telah memahami teks Al-Qur'an tentang keharusan melindungi air dari segala bentuk privatisasi dan komersialisasi telah pula menyadari betapa negara (pemerintah Daerah Kabupaten Serang) bukan hanya telah mencederai hak dasar warga secara kontekstual, tetapi juga bertolak belakang dengan semangat menjalankan amanah secara tekstual yang termaktub dalam Al-Qur'an. Kondisi ini menggerakkan kekuatan dan

kekuasaan masyarakat untuk menghentikan upaya komersialisasi air. Mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk mencabut izin yang diberikan kepada PT. Tirta Investama, membendung proyek eksploitasi air atas nama investasi sebagai bentuk kesadaran berQur'an dalam konteks jihad melawan kekeringan air dan memaksa Pabrik Aqua Danone hengkang dari bumi Padarincang.

Masyarakat Padarincang bangkit dan tumbuh menjadi masyarakat politik. Bagi Foucault, hal ini memungkinkan terjadi karena kekuasaan terdistribusi di semua relasi sosial dan tidak dapat direduksi menjadi bentuk-bentuk dan determinasi-determinasi ekonomis terpusat atau menjadi karakter legal atau yuridis. Bahkan, kekuasaan bukan hanya represif, tetapi juga produktif, ia melahirkan subjek (gerakan sosial). Foucault tidak atau 'merumuskan kekuasaan sebagai kekuatan pengendali yang terpusat, namun, kekuasaan tersebar pada semua level formasi sosial, karena kekuasaan bersifat generatif, yang artinya, memproduksi relasi-relasi sosial dan identitas baru (Barker, 2008: 85).

Melalui analisa yang ilmiah materi-materi yang berhubungan

dengan proyek pendirian Danone, analisa Amdal, kajian Undang-Undang Air, SK Bupati, melalui penggalangan masyarakat sebagai kesatuan yang murni dan solid dengan sharing partner NGO seperti Kontras, Walhi dan Kruha serta LBH Jakarta, masyarakat Padarincang melakukan aksi penolakan dalam mempertahankan haknya melalui jalur birokrasi dan jalur yang disebutnya 'jalan tikus'. Dengan berpegang teguh pada kekuatan jihad dan kemurnian gerakan, masyarakat padarincang percaya bahwa para ulama telah merestui dan Allah akan menurunkan mukjizatnya untuk menjaga apa yang telah diamanahkan oleh mereka, yaitu Air.

Kesolidan gerakan terjadi saat seluruh aspek komponen masyarakat saling memberikan kontribusinya sesuai kapasitasnya, bahkan sampai anak-anak. Dan bagaimana warga masyarakat memperjuangkan kebebasan lima warga yang diculik oleh Polisi dan tentara, dengan menculik balik tiga orang dari pihak pemerintahan, yaitu Camat Padarincang, Wakapolres dan anggota kepolisian Sektor Padarincang. Kemurnian terjadi saat banyak pihak eksternal ingin bergabung, membantu berjuang, terpaksa harus ditolak

masyarakat Padarincang, karena mereka masih sangat yakin bahwa mereka sanggup, karena Allah berada dipihaknya untuk menumbangkan kedzaliman, menyingkirkan kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admiranto, A. Gunawan. 2004. *50 Filsuf Kontemporer*. Kanisius. Yogyakarta
- Agger, Ben. 2009. *Teori Sosial Kritis. Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. Kreasi Wacana. Yogyakarta
- Barker, Chris. 2008. *Cultural Studies. Teor dan Praktik*. Kreasi Wacana. Yogyakarta
- Bracher, Mark. 2009. *Jacques Lacan, Diskursus dan Perubahan Sosial. Pengantar Kritik-Budaya Psikoanalisis*. Jalasutra. Yogyakarta.
- Dewey, Jhon. 1996. *Great Book of Western World*. Encyclopedia Britanica Inc, 1996. USA
- Foucault, Michel. 2002. *Pengeetahuan dan metode (Karya-Karya*

- Penting Foucault*). Jalasutra. Yogyakarta dan Bandung
- Gandhi, Leela (di Indonesiakan oleh Wahyutri & Hamidah). 2006. *Teori Poskolonial Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Qalam. Yogyakarta
- Hobsbawn, Eric & Terence Ranger (editors). 2004. *The Invention of Tradition*. Cambridge: cambridge University Press.
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Kritik Ideologi; Menyingkap Pertautan Antara Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Kanisius. Yogyakarta
- Jones, PIP. 2010. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Lechte, John. 2001. *Filsuf Kontemporer*. Kanisius. Yogyakarta
- Littlejohn, Stephen W. 2001. *Theories of Communication. Seventh Edition*. Wadsworth. USA
- Moore & Gilbert, Bart. 2000. *Postcolonial theory: contexts, Practices, Politics*. London: Verso
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods—3rd ed.* Sage Publications, inc. USA
- Ratna, Nyoman Kutha. 2008. *Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Syam, Nina W. 2012. *Psikologi Sosial Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Sutrisno, F.X. Mudji. 1997. *Pragmatisme*. Jakarta: PT Gramedia.
- West, Richard & Turner, Lynn H. 2007. *Introducing Communication Theory Analysis and Application. Third Edition*. McGraw-Hill. USA
- Wibowo, A. Setyo. 2004. *Gaya Filsafat Nietzsche*. Galang Press. Yogyakarta
- Sumber Lain:**
- e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara, diakses tgl 28 Desember 2012 pkl. 13.01
- www.jurnalnet.com. Diakses tgl 7 Januari 2013 pkl. 10.53
- Aditjondro dalam <http://mrskoes.blogspot.co.id>, diakses tanggal 6 Januari 2013 pukul 23:17

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id>
diakses 6 januari 2013 pk.
21.00):

Syahyuti, dalam
<http://kuliahsosiologi.blogspot.com>.
diakses tgl 8 Januari 2013 pk. 10.03

Peekhaus, Wilhelm. 2010. Undercover
Monsanto New Sosial Media.
Dilisensikan di bawah Atribusi Creative
Commons Non-Komersial Tidak ada
Derivatif (by –nc-nd). Tersedia di
<http://ijoc.org>.